DAMPAK KEBIJAKAN PEMERINTAHAN PADA MASA ORDE BARU

Pada masa Orde Baru, pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto menerapkan berbagai kebijakan untuk menciptakan stabilitas nasional dan mendorong pembangunan. Kebijakan tersebut membawa perubahan dalam bidang politik, ekonomi, serta sosial budaya. Namun, selain menghasilkan sejumlah kemajuan, kebijakan Orde Baru juga menimbulkan berbagai masalah.

1. Dampak dalam Bidang Politik

   Pemerintahan Orde Baru bersifat otoriter dan sentralistis. Kekuasaan serta pengambilan keputusan banyak berpusat pada pemerintah pusat, sedangkan pemerintah daerah memiliki ruang gerak yang terbatas. Prinsip demokrasi mengalami penyimpangan. Pemilu dilaksanakan secara berkala, tetapi pergantian kekuasaan di tingkat presiden hampir tidak terjadi. Presiden Soeharto memimpin selama enam periode pemerintahan. Rekrutmen jabatan politik berlangsung tertutup dan banyak ditentukan berdasarkan kedekatan dengan presiden atau pemerintah. Keadaan ini mendorong berkembangnya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Penyimpangan kebijakan memicu berbagai demonstrasi dan kerusuhan, antara lain Peristiwa Malari (1974), Tanjung Priok (1984), Warsidi (1989), dan Tragedi Trisakti (1998). Penyederhanaan atau fusi partai politik memperkuat dominasi Golkar. ABRI dan pegawai negeri sipil (PNS) diwajibkan mendukung Golkar, sehingga persaingan politik menjadi tidak seimbang. Kebebasan pers dibatasi melalui pengawasan pemerintah. Penerbitan pers memerlukan Surat Izin Terbit (SIT) dan Surat Izin Usaha Penerbitan Pers (SIUPP). Media yang dianggap mengkritik pemerintah dapat dikenai pembredelan.

2. Dampak dalam Bidang Ekonomi

   Pemerintah melakukan rehabilitasi ekonomi dan pembangunan secara berkelanjutan. Pada periode 1969–1994, produk domestik bruto (PDB) Indonesia tumbuh rata-rata sekitar 6,8% per tahun, sedangkan PDB per kapita meningkat rata-rata sekitar 4,8% per tahun. Pemerintah mengembangkan sektor pertanian melalui program peningkatan produktivitas. Kebijakan ini membantu Indonesia mencapai swasembada beras pada pertengahan 1980-an dan memberikan manfaat bagi banyak petani. Pembangunan infrastruktur, seperti jalan raya, jembatan, dan sarana transportasi, diperluas untuk memperlancar kegiatan ekonomi dan hubungan antardaerah. Pendapatan negara meningkat ketika harga minyak bumi melonjak pada 1970-an. Kenaikan harga minyak dipengaruhi oleh kondisi politik global, termasuk embargo minyak Arab pada 1974 dan gejolak politik Iran pada 1978. Pada awal 1990-an, GNP per kapita Indonesia meningkat hingga sekitar US$1.300. Akses listrik, televisi, dan sekolah juga semakin berkembang, termasuk di wilayah perdesaan. Kemajuan ekonomi tidak dinikmati secara merata. KKN, lemahnya pengawasan distribusi dana pembangunan, dan kesenjangan ekonomi menjadi masalah. Berbagai persoalan tersebut ikut memperburuk krisis moneter 1997 yang berkembang menjadi krisis multidimensional dan mengakhiri pemerintahan Orde Baru pada Mei 1998.

3. Dampak dalam Bidang Sosial Budaya

   Salah satu dampak kebijakan Orde Baru terlihat dalam bidang pendidikan. Pemerintah membangun banyak sekolah dasar melalui program SD Inpres sehingga anak-anak lebih mudah

memperoleh akses pendidikan formal. Pembangunan sekolah disertai program pemberantasan buta huruf dan peningkatan kemampuan membaca masyarakat. Data sensus penduduk yang tercantum dalam materi menunjukkan bahwa pada 1980, angka melek huruf mencapai 80,4% pada laki-laki dan 63,6% pada perempuan. Pada 1990, angka tersebut meningkat menjadi 89,6% pada laki-laki dan 78,7% pada perempuan.

Kesimpulan

Kebijakan pemerintahan Orde Baru membawa perubahan besar bagi Indonesia. Dalam bidang ekonomi dan pendidikan terdapat kemajuan, seperti pertumbuhan ekonomi, swasembada beras, pembangunan infrastruktur, perluasan sekolah, dan peningkatan angka melek huruf. Di sisi lain, kehidupan politik dibatasi oleh kekuasaan yang terpusat, lemahnya demokrasi, pembatasan pers, serta praktik KKN. Ketimpangan dan krisis ekonomi pada 1997–1998 akhirnya menjadi salah satu faktor yang menyebabkan berakhirnya pemerintahan Orde Baru pada Mei 1998.

PENUGASAN DIKERJAKAN DAN DI KIRIM LEWAT WA

1. Jelaskan bagaimana sistem pemerintahan pada masa Orde Baru di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto!
2. Apa yang dimaksud dengan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN), dan mengapa praktik tersebut berkembang pada masa Orde Baru?
3. Sebutkan empat peristiwa demonstrasi atau kerusuhan yang terjadi pada masa Orde Baru!
4. Jelaskan keberhasilan pemerintah Orde Baru dalam bidang pertanian!
5. Jelaskan dampak positif dan negatif kebijakan pemerintahan Orde Baru bagi kehidupan masyarakat Indonesia!